

[Type text]

**FUNGSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI
KEKUATAN POLITIK DALAM MENGAWAL KASUS KORUPSI
DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik

Oleh:

NUNUG GAZALI
BP. 1110833019



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRAK

Nunug Gazali (1110833019). Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi: *Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai Kekuatan Politik dalam Mengawal Kasus Korupsi di Sumatera Barat*. Pembimbing 1: Dr. Asrinaldi M.Si. Pembimbing 2: Sadri S.IP. M.Soc.Sc. Buku Referensi 24 buku, dengan jumlah halaman sebanyak 125 halaman.

Penelitian ini menjelaskan fungsi LSM sebagai kekuatan politik dalam mengawal kasus korupsi di Sumatera Barat, menggunakan kerangka konseptualisasi Sistem Gabriel Almond. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan tipe kolektif, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara umum. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan karakteristik umum. Data yang ditemukan dianalisis dengan menggunakan analisa secara deskriptif tanpa menafikkan data-data yang bersifat kualitatif. Dan metode analisis yang digunakan adalah analisis etik dan emik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi LSM sebagai kekuatan politik dalam mengawal kasus korupsi di Sumatera Barat terlihat lemah. Kelemahan ini terlihat dalam mendorong prakarsa serta pengawasan oleh masyarakat untuk mengembangkan kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum. Dalam melakukan pengawalan terhadap kasus korupsi, LSM mendapatkan hambatan dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawalan terhadap kasus korupsi seperti lambannya para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi. Banyaknya terpidana bebas mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap terpidana korupsi. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab besar bagi pengadilan. Di samping lemahnya pengadilan dalam mengadili pelaku korupsi, seharusnya LSM menanggapi hal ini dengan memberikan kritik terhadap kelalaian pengadilan dan penegakan hukum, disanalah fungsi LSM sebagai kekuatan dalam melakukan pengawalan terhadap pelaku korupsi. Namun hal demikian tidak terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh LSM, dan terlalu banyaknya konflik dan kepentingan yang mengintervensi.

Kata Kunci: Fungsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kekuatan Politik, Korupsi.

ABSTRACT

Nunug Gazali (1110833019). Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Andalas. Thesis Title: *Function of Non Governmental Organization (NGO) as Political Strength in escorting Corruption in West Sumatra*. Supervisor 1: Dr. Asrinaldi M.Sc. Supervisor 2: Sadri S.IP. M.Soc.Sc. Reference Books 24 books, with page number as many as 125 pages.

This study describes the function of NGOs as a political force in initiating cases of corruption in West Sumatra, use the system conceptualization framework Gabriel Almond. This study uses a qualitative method with a case study of collective type, so that the analysis carried out in general. Data collection techniques are in-depth interview, the selection of informants using purposive sampling techniques, both individuals and groups to obtain general characteristics. The data found were analyzed using descriptive analysis without subjecting the data are qualitative. And analytical methods used are ethical and emic analysis. The results of this study explains that NGOs function as a political force in initiating cases of corruption in West Sumatra look weak. This weakness is seen in driving initiatives and supervision by society to develop corruption cases and report the perpetrators to law enforcement. In doing guard against corruption, the NGO get obstacles in carrying out its functions to guard against corruption as the slow pace of the law enforcement agencies in solving corruption cases. The number of free convict reflects weak enforcement of laws against corruption convicts. This should be a great responsibility for the court. In addition to the weakness of the courts in prosecuting perpetrators of corruption, should NGOs respond to this by providing a critique of the negligence of the court and law enforcement, that's where NGOs function as a force in the escort towards corruption. But such things do not happen because of the lack of resources of the NGOs, and too many conflicts and interests intervene.

Keywords: Functions, Non Governmental Organizations (NGO), The Power of Politics, Corruption.